

EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang)

Silviana¹, Khoiron², Septina Dwi Rahmawati³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: 22101091046@unisma.ac.id*

ABSTRAK

Peningkatan jumlah angka tidak sekolah Kota Malang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kedungkandang menjadi urutan pertama dengan jumlah anak tidak sekolah sebanyak 1.146 anak. Alasan tersebut yang mendasari program ini diperlukan adanya evaluasi kebijakan. Untuk menganalisis evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari William N. Dunn (2000) untuk menilai dengan menggunakan indikatornya meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang dipilih pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan ini sudah dijalankan dengan baik dan dibarengi oleh program pendukung seperti bantuan beasiswa, program Ajak Anak Sekolah Kembali "AKAS", home visit atau kunjungan langsung ke rumah, program vokasi dan penyediaan transportasi bus sekolah. Dengan kerjasama oleh semua pihak mulai dari pemerintah, guru, orang tua serta anak itu sendiri, maka angka putus sekolah akan berkurang dan angka partisipasi sekolah dapat meningkat. Tantangan yang dihadapi dalam program ini meliputi kurangnya jangkauan akses pendidikan ke daerah pinggiran kota dan ekonomi keluarga. Bus sekolah dan beberapa angkutan umum tidak menjangkau ke daerah mereka. Dengan memastikan kebijakan ini tepat sasaran, diharapkan dapat mengurangi hingga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Dinas Pendidikan berperan secara signifikan dalam mengurangi angka putus sekolah di Kota Malang. Dengan adanya program pendukung dan kerjasama oleh semua pihak, maka diharapkan semua anak bersekolah hingga 12 tahun agar siap untuk memasuki dunia kerja. Meskipun terdapat tantangan dalam ekonomi keluarga sehingga anak-anak memilih untuk membantu orang tuanya, dengan strategi yang lebih keras dan tepat sasaran dapat membantu menaikkan minat untuk sekolah kembali.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pendidikan, Putus Sekolah

Pendahuluan

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan telah berupaya mengimplementasikan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga pelaksana utama di daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang memiliki tugas yang signifikan untuk memastikan bahwa kebijakan ini terlaksana secara menyeluruh dan inklusif di semua kecamatan, termasuk di Kecamatan Kedungkandang yang menjadi urutan pertama dengan jumlah anak tidak sekolah di Kota Malang.

Tabel 1 Urutan kecamatan dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kedungkandang	1.146 anak
2.	Sukun	768 anak
3.	Klojen	628 anak
4.	Lowokwaru	513 anak
5.	Blimbing	347 anak

Sumber: Radarmalang.jawapos.com, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kota Malang ternyata masih ada yang putus sekolah, argumen tersebut didukung menurut informasi dari saluran resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ditahun 2023, jumlah sekolah dasar di Kota

Malang mencapai 320 sekolah. Kota Malang masih menghadapi tantangan dalam pendidikan, terutama terkait Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar yang belum mencapai 100 persen. Penyebab terbesar masalah tersebut adalah kasus anak yang tidak melanjutkan studi atau berhenti sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus, terutama di Kecamatan Kedungkandang, untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan dasar agar semua anak usia pendidikan mendapatkan kesempatan belajar. Terdata per 31 Januari 2025 di Kecamatan Kedungkandang terdapat 1.146 anak, kemudian urutan kedua di Kecamatan Sukun dengan 768 anak, Kecamatan Klojen 628 anak, Kecamatan Lowokwaru 513 anak, dan Kecamatan Klojen 347 anak. Kasus paling banyak di Kedungkandang dikarenakan wilayah tersebut berstatus memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lain.

Merujuk pada data yang dipublikasi oleh BPS Kota Malang memiliki angka putus sekolah mencapai 1,46% untuk usia 13 – 15 tahun. Di sisi lain APS untuk kelompok umur 19 – 24 tahun pada tahun 2021 tercatat 40,62%, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 41,72% dan pada 2023 menjadi 46,03%. Menurut data tersebut, meskipun program wajib belajar 12 tahun sudah berjalan akan tetapi sampai saat ini masih mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Perlu adanya evaluasi atau penelitian lebih dalam mengenai alasan siswa putus sekolah, utamanya pada rentan usia remaja. Dari banyaknya sekolah yang ada di Kota Malang, berarti setidaknya ada satu siswa yang tidak tamat sekolah. Hal itu, perlu dikaji lebih mendalam agar para siswa memiliki motivasi belajar dan menurunkan angka putus sekolah di Kota Malang.

Menurunkan Angka Putus Sekolah (APS) merupakan tujuan dari program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Program tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan dasar hingga jenjang SMA atau sederajat, tanpa terkendala oleh masalah ekonomi atau akses pendidikan. Program wajib belajar di Indonesia telah mengalami perkembangan cukup panjang, bermula sejak era kolonial Belanda hingga era kemerdekaan dan masa kini (Sultani dan Kristanti, 2020).

Kebijakan ini didasarkan peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 mengenai program wajib belajar 9 tahun. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah pusat telah menyusulkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal. Dalam pelaksanaannya proses wajib belajar 12 tahun ini, warga dapat memperoleh mulai dari pendidikan formal tingkat dasar, menengah pertama, sampai menengah atas.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti, seharusnya dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun tersebut, dapat menekan jumlah kenaikan putus sekolah dan angka partisipasi murni. Namun, pada kenyataannya masih terus meningkat setiap tahunnya. Jadi, dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti dapat memahami apakah program wajib belajar ini perlu diidentifikasi dan dievaluasi dalam implementasi kebijakannya agar dapat diketahui penyebab utama dari naiknya angka putus sekolah di Kota Malang. Berdasarkan isu atau permasalahan yang diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud mengangkat topik penelitian mengenai kebijakan ini dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kecamatan Kedungkandang (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang dengan menggunakan indikator evaluasi William N. Dunn yang terdiri dari: a) efektivitas, b) efisien. c) kecukupan, d) pemerataan, e) responsivitas, dan f) ketepatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara akademis, penulis berharap dapat bermanfaat dalam hal memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kota Malang, khususnya yang berkaitan dengan bidang Ilmu Administrasi Publik..
2. Manfaat Praktis
Secara penerapan dalam kehidupan sehari-hari, peneliti memberi masukan positif kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang terkait strategi dan langkah – langkah yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di daerah Kecamatan Kedungkandang.

Tinjauan Pustaka

1. Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Evaluasi kebijakan adalah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar – benar dihasilkan (Dunn, 2000; 28). Dengan demikian, evaluasi kebijakan adalah proses menilai sejauh mana hasil kebijakan yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi kebijakan dari William N. Dunn memiliki indikator yang digunakan peneliti untuk menilai kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. adapun indikator evaluasi kebijakan disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 2 Indikator Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisien	Seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok – kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok tertentu?
Ketetapan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn (2000; 610)

2. Kebijakan

Menurut Carl J Federick yang dikutip dari Leo Agustino adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kendala serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meraih tujuan yang signifikan ditetapkan (Agustino, 2008; 7).

Sedangkan menurut James E Anderson kebijakan adalah serangkaian tindakan yang menagndung maksud tertentu yang dijalankan dan diikuti oleh pihak pelaksana ataukah sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009;17).

Jadi, dapat disimpulkan kedua ahli ini memandang kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diarahkan untuk merespons tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan spesifik, baik itu dalam lingkungan tertentu atau untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye mencakup apapun yang diperbuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, menunjukkan adanya kebebasan dalam menentukan prioritas. Easton menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil interaksi antara pemerintah dan lingkungannya, di mana keputusan yang baik akan mempertimbangkan dan menanggapi perubahan yang terjadi di sekitar. Sedangkan menurut David Easton, kebijakan publik dirumuskan oleh pihak-pihak berwenang berdasarkan fakta dan pertimbangan matang. Secara keseluruhan, kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan yang didasarkan pada kondisi nyata, disusun oleh pihak berwenang, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan (Inu Kencana, 2007; 86).

Sebelum menentukan sebuah kebijakan publik terdapat proses sebagai serangkain tahap kegiatan untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik. Tahapan membuat kebijakan publik ada 5 (Meutia, 2013; 15) yaitu: 1) penentuan agenda, 2) perumusan pilihan kebijakan, 3) penetapan kebijakan, 4) pelaksanaan atau implementasi kebijakan, dan 5) penilaian atau evaluasi kebijakan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini sebagai suatu cara dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta yang ada kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami nilai dari setiap variabel yang memiliki sifat independen tanpa menciptakan hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya. Menurut Borgan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata, tulisan, serta perilaku individu yang sedang diteliti .(Tersiana, 2018; 10). Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh bersifat deskriptif dan berupa verbal atau tulisan serta prilaku subyek yang diamati.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah batasan permasalahan dalam penelitian kualitatif yang mencakup inti permasalahan yang bersifat umum. Maka yang dijadikan sebagai fokus pada evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang dengan indikator nya yakni:

- 1) Efektivitas
- 2) Efisiensi
- 3) Kecukupan
- 4) Perataan
- 5) Responsivitas
- 6) Ketepatan

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan yakni Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang ber alamat di Jl. Veteran No.19, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yang tepat dikarenakan adanya keterlibatan instansi dengan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan implementasi kebijakan terkait. Selain itu, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya memiliki akses langsung dalam memperoleh data terkait sistem pendidikan di Kota Malang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yakni:

a) Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh melalui sumber utama tanpa melalui perantara yaitu sebagai subyek penelitian (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini penentuan informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013; 2018). Peneliti memilih informan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Dasar yakni Kepala bidang pembinaan pendidikan dasar, Kepala seksi kurikulum dan penilaian, Kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter, dan Staff Kurikulum dan Penilaian.

b) Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui data – data pendukung maupun sumber kedua yang meliputi buku, jurnal, media internet yang relevan dengan tema penelitian dan berkaitan dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data proses dimana peneliti memilih metode yang paling sesuai untuk memperoleh data, yang kemudian diikuti dengan penyusunan alat bantu atau instrument yang diperlukan (Arikunto, 2019; 265). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti meelakukan pengamatan selama totalnya 3 bulan. Pengamatan dilakukan mengenai kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun pada bulan Oktober 2024 serta keadaan lokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pada 31 Januari 2025. Pada kegiatan pengamatan, kurun waktu atau frekuensi dilakukan dengan durasi 1 – 2 jam setiap observasi.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam mengenai efektivitas, efisiensi, ketepatan, responsivitas, kecukupan, dan perataan tentang evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Informan yang diwawancarai yaitu kepala bidang pendidikan dasar, kepala seksi, dan staff. Setiap informan melakukan proses wawancara dengan durasi 30 menit setiap sesi nya. Wawancara dilakukan selama 4 sesi. Wawancara dibagi atas 2 pertemuan, yang pertama dimulai pada tanggal 17 Februari melalui media *WhatsApp* kemudian pada tanggal 26 Februari secara tatap muka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto yang melibatkan subyek, serta pengambilan foto dokumen yang dibutuhkan. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan peneliti meliputi gambaran umum keadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan dokumentasi saat wawancara dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan penelitian.

Teknik Analisis Data

Miles and Huberman proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga seluruh data selesai dianalisis secara menyeluruh. proses dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui cara atau prosedur dalam mengolah data yang sudah didapat ataupun yang akan diolah dari hasil temuan penelitian di lapangan. Prosedur pelaksanaan teknik analisis data yakni:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dalam keadaan yang belum valid. Data

kemudian dikumpulkan dari hasil tanya jawab berupa evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di kecamatan kedungkandang, temuan dari hasil observasi yaitu pengamatan program beasiswa yang diajukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan dan pengamatan mengenai sosialisasi pendidikan karakter kepada siswa yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian data yang dikumpulkan pada saat dokumentasi yaitu foto proses wawancara dengan informan.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

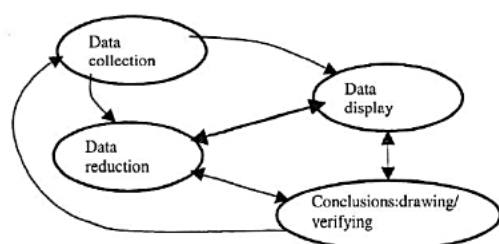
Saat pengumpulan data berlangsung, kemudian kondensasi data selanjutnya ditulis kembali dengan ringkas, mengembangkan tema, menghasilkan kategori. Dengan adanya kondensasi data, maka data mengenai evaluasi program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang akan jauh lebih kuat dan valid. Setelah melakukan pengumpulan data tersebut, peneliti akan memfokuskan pada evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data disesuaikan dengan fokus sehingga mempermudah dalam menganalisa data. Diantaranya adalah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Dari data yang sudah di filter melalui kondensasi data, peneliti akan memfokuskan hasil temuan dengan menggunakan indikator teori untuk mengevaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Pengambilan kesimpulan dilakukan mulai mengumpulkan data, mencatat pola, penjelasan alur sebab akibat, dan proposisi. Pada proses ini, data yang telah disajikan secara sistematis ditarik kesimpulannya berdasarkan dengan fokus penelitian yang diteliti Artinya, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan tentang evaluasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Penarikan kesimpulan harus diverifikasi selama berjalannya penelitian untuk menjamin kebenaran data atau informasi yang didapatkan. Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data Miles and Huberman (1984)



Sumber: dalam Sugiyono (2013; 247)

Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, faktor utama yang menjadi acuan dalam data hasil adalah , valid, reliable, dan obyektif (Sugiyono, 2013; 269). Dikarenakan dalam proses mengumpulkan data perlu diuji apakah data tersebut sudah benar – benar valid belum. Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji kredibilitas (validitas interbal). Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan konfirmasi dengan realitas subjek, Triangulasi, *Member Checking*, *Persistent Observing*, *Prolonged Engagement*, *Peer Debriefing*. Uji kredibilitas dilakukan untuk menguji terhadap data yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil temuan, data perlu divalidasi dengan melakukan proses penelitian ke lapangan. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu (Sugiyono, 2013).

1. Triangulasi Sumber

Pengambilan data dilakukan oleh atasan yang menguasai, bawahan yang dipimpin, dan staff. Sumber data diambil dari kepala bidang yaitu Bapak Muflikh Adhim, bawahan kepala bidang yaitu kepala seksi yaitu Ibu Ririn dan Ibu Ida, dan staff yang bekerja di bawah kepala seksi yakni Ibu Dian.

2. Triangulasi Teknik

Jika data diperoleh dengan observasi, kemudian dilanjutkan pengecekan dengan wawancara, dokumentasi, atau kuisioner. Disini peneliti menghasilkan data yang berbeda, sehingga kemudian melakukan diskusi kepada informan

3. Triangulasi Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini dimulai dari observasi yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025 kemudian pengambilan data wawancara dan dokumentasi pada bulan Februari 2025. Peneliti melakukan wawancara tatap muka selama satu kali, kemudian dilanjutkan melalui media *WhatsApp* selama beberapa kali.

Pembahasan

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun merupakan upaya pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan minimal hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Jika dulu wajib belajar hanya 9 tahun (SD-SMP), sekarang ditambah menjadi 12 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah agar generasi muda memiliki bekal untuk masa depan, meningkatkan akses pendidikan dimana semua anak bisa sekolah tanpa terkendala biaya,

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya karena pendidikan yang lebih tinggi membuka lebih banyak peluang kerja dan inovasi. Akan tetapi, permasalahan masih adanya anak yang putus sekolah menunjukkan adanya evaluasi dari kebijakan tersebut. Menurut William N. Dunn terdapat 6 (enam) indikator yang dapat menilai kebijakan tersebut, adapun indikator yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Efektivitas

Pada penelitian ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbukti cukup efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya pendidikan serta memberikan beasiswa atau bantuan finansial, menyediakan program sekolah terbuka dan pendidikan nonformal. Jadi, jika dilihat antara kesesuaian tujuan dengan hasil yang diharapkan berdasarkan indikator efektivitas, program ini sudah mengarah pada efektivitasnya karena langkah – langkah yang diambil tepat sasaran, terutama dalam mengatasi hambatan biaya, dan kesadaran masyarakat.

Efektivitas merupakan upaya pencapaian hasil yang diinginkan telah tercapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun efektif. Sehingga efektivitas dapat diukur dengan apakah hasil yang diinginkan benar – benar tercapai. Pada penelitian ini, kebijakan wajib belajar 12 tahun bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah dan memastikan pemerataan sekolah di Indonesia khususnya di Kota Malang. dari sisi ketepatan sasaran, program ini sudah memastikan masyarakat yang memang butuh bantuan pendidikan, hal ini dibuktikan dari bantuan biaya pendidikan yang tepat sasaran ke keluarga kurang mampu. Namun, dalam sisi kelancaran pelaksanaan masih ditemukan kendala pada transportasi di wilayah pinggiran. Jadi, meskipun kebijakan telah berhasil meningkatkan jumlah anak yang bersekolah, pencapaian secara keseluruhan dalam hal kualitas pembelajaran, ketepatan kurikulum, dan pencapaian kompetensi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Malang, tantangan pada efektivitas putus sekolah terdapat beberapa faktor seperti kurangnya motivasi bersekolah, keterbatasan ekonomi, dan pernikahan dini. Untung mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan telah menginisiasi program tambahan yang disebut sebagai “AKAS” atau Ajak Kembali Anak Sekolah yang bertujuan menurunkan Angka Tidak Sekolah (ATS).

2. Efisien

Efisien merujuk pada jumlah upaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk menanggapi masalah angka putus sekolah, Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp223,835 miliar pada tahun 2023 untuk mendukung sektor pendidikan. Alokasi ini terdiri dari Rp5,457 miliar untuk DAK Fisik dan Rp218,377 miliar untuk DAK Nonfisik. Selain itu, upaya lain seperti pemberian beasiswa dan bantuan finansial juga telah ditingkatkan. Selain itu, Bentuk usaha atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah maksimal, mulai dari sosialisasi, koordinasi, bahkan turun langsung ke lapangan melakukan kunjungan kepada anak – anak yang beresiko putus sekolah untuk tidak melanjutkan pendidikan. Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Kedungkandang dilakukan melalui berbagai upaya strategis, termasuk sosialisasi kepada orang tua, pendampingan siswa, dan koordinasi dengan sekolah. Pendekatan jemput bola menjadi salah satu strategi utama, di mana tim turun langsung ke lapangan untuk mengunjungi anak-anak yang berisiko putus sekolah. Selain itu, kerja sama dengan kelurahan serta RT/RW turut memperkuat penyebaran informasi mengenai pentingnya pendidikan.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan digunakan untuk menilai sejauh mana mewujudkan hasil yang diharapkan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Indikator kecukupan dalam mengevaluasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun mencakup beberapa aspek utama, seperti angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah, tingkat kelulusan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Tingkat kelulusan menjadi bukti efektivitas pembelajaran, sedangkan ketersediaan sekolah, tenaga pendidik yang memadai, dan dukungan fasilitas seperti beasiswa serta transportasi menentukan aksesibilitas pendidikan bagi semua kalangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan Angka Putus Sekolah (APS) disbanding tahun sebelumnya. Namun, masih ditemukan tantangan dalam memberikan hak pendidikan yang setara bagi peserta didik dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi tetap menjadi kendala utama bagi sebagian siswa, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan mereka dapat terus bersekolah. Dengan kerja sama antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas di masa yang akan datang.

Secara internal, tantangan yang dihadapi adalah kecenderungan beberapa anak untuk lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. Untuk mengatasi hal ini, program edukatif seperti kunjungan rumah (home visit) dilakukan bersama guru dan tokoh masyarakat guna membujuk mereka kembali bersekolah.

4. Perataan

Dalam pendidikan, perataan berarti memastikan semua anak, baik dari keluarga kaya maupun miskin, punya kesempatan yang sama untuk bersekolah dengan fasilitas yang layak. Perataan merupakan biaya dan manfaat disalurkan secara merata kepada berbagai kelompok yang berbeda. Kecamatan Kedungkandang menjadi daerah yang memiliki angka putus sekolah tertinggi di Kota Malang dikarenakan banyak anak yang harus berkerja atau meyakini ini. Selain itu terjadi kendala dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, atau akses internet yang belum merata.

Dinas pendidikan memastikan pemerataan beasiswa kepada keluarga yang kurang mampu salah satunya dengan tanpa pemungutan SPP. Pemerataan bantuan sekolah menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung keberlanjutan program Wajib Belajar 12 Tahun. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), beasiswa, serta bantuan seragam dan perlengkapan sekolah telah diberikan untuk memastikan tidak ada anak yang terhambat dalam mengakses pendidikan karena kendala biaya. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam kesenjangan fasilitas antara sekolah di pusat kecamatan dan daerah pinggiran. Oleh karena itu, upaya perbaikan terus dilakukan agar seluruh siswa, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pendidikan yang setara.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun mengacu pada sejauh mana hasil dari kebijakan tersebut bisa mencukupi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari berbagai kelompok masyarakat khususnya kepuasan orang tua. Kebijakan yang baik harus bisa menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan benar-benar memberikan manfaat bagi semua kelompok yang terdampak. Tingkat kepuasan wali murid mengenai kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Kedungkandang cukup tinggi, dengan sekitar 80% menyatakan bahwa program ini membantu, terutama dalam hal keringanan biaya sekolah dan peningkatan akses beasiswa. Namun, masih ada sebagian wali murid yang merasa terbebani, khususnya mereka yang anaknya harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah

karena keterbatasan akses transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini sudah memberikan manfaat yang signifikan, masih diperlukan perbaikan, terutama dalam aspek infrastruktur pendukung, agar kepuasan orang tua semakin merata. Kebijakan wajib belajar 12 Tahun di Kecamatan Kedungkandang dinilai cukup responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga banyak orang tua yang merasa puas dengan usaha yang dikerjakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang terus berupaya agar setiap anak, tanpa memandang latar belakangnya, dapat menikmati pendidikan yang layak.

Akses ke sekolah juga menjadi hal penting karena menentukan siswa menuju ke sekolah atau tidak. akses pendidikan di Kecamatan Kedungkandang sudah semakin terbuka dengan adanya dana BOS dan beasiswa yang memungkinkan siswa kurang mampu bersekolah tanpa pungutan biaya. Namun, tantangan masih muncul terutama di daerah pinggiran, di mana jarak ke sekolah yang jauh dan keterbatasan transportasi menjadi kendala utama.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan publik mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh memberikan manfaat nyata dan bernilai bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan mengurangi angka putus sekolah, artinya jika setelah diterapkan angka putus sekolah menurun signifikan, berarti kebijakan tersebut tepat sasaran. Selain itu, kebijakan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan atau kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kebijakan harus menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan, serta memiliki efek jangka panjang yang positif.

Untuk memberikan dukungan terhadap program wajib belajar 12 tahun ini agar dapat mencapai 100%, salah satu upaya untuk meningkatkan agar anak senang bersekolah adalah dengan memberikan opsi program kejuruan setelah lulus SMP. Siswa dapat memilih untuk lanjut ke SMA atau SMK. Program kejuruan berperan penting dalam memberikan alternatif pendidikan yang lebih praktis dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Hasil kebijakan ini sudah sesuai dengan ketepatannya. Hal ini dibuktikan dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, yakni akses pendidikan yang lebih terbuka, peningkatan kualitas pengajaran, serta peluang kerja yang lebih

baik bagi lulusan. Meskipun demikian, narasumber juga menyebutkan bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki, menandakan evaluasi dan penyesuaian tetap diperlukan agar kebijakan ini semakin tepat sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dalam tahun ini sudah mengalami penurunan pada anak putus sekolah berdasarkan pengukuran efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Serta dibuktikan secara efektivitas angka putus sekolah berhasil turun sebanyak lima persen jika dilihat berdasarkan efektivitasnya. Akan tetapi pencapaian dalam akses transportasi di beberapa wilayah masih belum tercapai. Berdasarkan efisiensi, sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa tenaga pendidik, bantuan finansial atau beasiswa, dan fasilitas pendidikan sudah efektif. Pemerintah telah berupaya menambah anggaran untuk pendidikan dan berupaya strategis dengan program tambahan yang melibatkan orang tua. Sedangkan kecukupan mengenai masalah yang dihadapi penyebab putus sekolah paling banyak adalah faktor ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya memberikan bantuan beasiswa dan program mengajak kembali anak sekolah atau 'AKAS'. Dari pemerataan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti akses pendidikan dan bantuan yang melum menjangkau ke semua daerah karena pemberian beasiswa bersyarat. Sedangkan dari responsivitasnya, 80% masyarakat sudah cukup puas dengan adanya bantuan pendidikan, akan tetapi terdapat tantangan pada kurang meratanya akses ke sekolah. Kemudian ketepatan atau manfaat yang dihasilkan sudah efektif, hal ini dibuktikan mengenai pemberian seragam gratis dan pengadaan program penjurusan untuk bekal siswa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan adanya kebijakan usaha diteruskannya dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun ini, masyarakat menjadi lebih sadar mengenai pentingnya pendidikan untuk anak – anaknya. Kebijakan ini menghasilkan tingkat partisipasi siswa dalam jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK mengalami peningkatan signifikan, meskipun angka putus sekolah masih ada. Dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi dalam pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang menjadi objek evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyampaikan dapat dijadikan bahan

pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar 12 tahun, terutama di wilayah dengan angka partisipasi pendidikan yang masih rendah. Gunakan media lokal, forum RT/RW, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk menjangkau warga secara langsung.
2. Mengadakan pelatihan berkala untuk guru agar mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran modern, pembelajaran berbasis digital, serta pendekatan pedagogis yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial siswa.
3. Mengajak pihak-pihak lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan organisasi non-pemerintah untuk menangani masalah yang beririsan dengan pendidikan, seperti gizi buruk, kekerasan anak, atau pernikahan dini.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Abbas, Salim. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindon Persada.
- Abdoellah, & Rusfiana Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan*. Malang: Empatdua Media
- Ahmad, Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat & Abdilllah. (2019). *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 17.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
- Ramli, Muhammad. (2022). *Electronic Government Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya. Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.

- Pendidikan Tambusai, 9(2), 99–113.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Yuliwati, Yuliawati. (2022). Wajib Belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110–118.
<https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>

Sumber internet:

Nanda. (2024). Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Belum 100 Persen. Malang. Radarmalang.jawapos.com. URL: <https://radarmalang.jawapos.com/pendidik-an/815117052/masih-ada-yang-putus-sekolah-di-malang-angka-partisipasi-murni-pendidikan-dasar-belum-100-persen>. Diakses pada 3 Oktober 2024.

Indo, Benni. (2024). Angka Putus Sekolah di Kota Malang Meningkat. Malang. Suryamalang.tribunnews.com. URL: <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/03/20/angka-putus-sekolah-di-kota-malang-meningkat?page=2>. Diakses pada 3 Oktober 2024.

- Putra. (2025). *Terdata 3.406 Anak di Kota Malang Tidak Sekolah - Radar Malang*. Terdata 3.406 Anak Di Kota Malang Tidak Sekolah - Radar Malang; Radar Malang. <https://radarmalang.jawapos.com/berita-terbaru/815644217/terdata-3406-anak-di-kota-malang-tidak-sekolah>